



MENGELOLA POTENSI DESA SEBAGAI MODAL BISNIS BADAN USAHA MILIK GAMPONG BAKAU HULU

Devi Maulana^{1*}, Taufik Raharjo²,
Marianto³

¹⁾ Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan

²⁾ Diploma III Manajemen Aset, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan

*Corresponding author

Email : kakamilaniki9@gmail.com

Abstraksi

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Gampong Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan metode pendampingan dengan tahapan diskusi kelompok terarah dan pendampingan. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan bantuan dalam memperbaiki berkas-berkas kelembagaan, khususnya berkas pendirian, membuat analisa kelayakan usaha untuk rencana usaha baru, dan menyusun laporan keuangan sesuai kemampuan. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Gampong Bakau Hulu adalah dari segi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas mengakibatkan berkas kelembagaan tidak rapi, perencanaan bisnis belum menggunakan analisis kelayakan sehingga sangat riskan. dalam pelaksanaannya, serta pengelolaan keuangan yang masih manual. Dampak dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya berkas-berkas kelembagaan BUMG serta tersusunnya analisis kelayakan bisnis BUMG sehingga pengelolaan BUMG lebih terarah.

Kata kunci: BUMDesa, Pengabdian Kepada Masyarakat, Manajemen

Abstract

The purpose of this community service is to identify problems and provide solutions related to the management of Village-Owned Enterprises. This community service activity was held in Gampong Bakau Hulu, Labuhanhaji District, South Aceh Regency. This community service activity is carried out with a mentoring method approach with the focus groups discussion and accompaniment stages. The solution offered is to provide assistance in repairing institutional files, especially establishment files, making a business feasibility analysis for a new business plan, and compiling financial reports according to their abilities. From the implementation of this community service activity, it can be concluded that the problems encountered in the management of the Gampong Bakau Hulu's Village-Owned Enterprises are in terms of Human Resources which are still limited, resulting in untidy institutional files, business planning has not used feasibility analysis so it is very risky. in its implementation, as well as financial management that is still manual. The impact of this community service activity is the compilation of BUMG institutional files and the compilation of BUMG business feasibility analysis so that BUMG management is more focused.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Community Service, Management

© 2023 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

PENDAHULUAN

Desa telah diberikan hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan Undang-Undang ini,

Pemerintah berupaya melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, maju, dan demokratis, sehingga menciptakan landasan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, Desa memiliki otonomi tersendiri dalam mengelola rumah tangganya.

Pemerintah daerah membuat kebijakan otonomi desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan pendapatan desa. Dan salah satu kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Amanda, 2015).

BUMDesa didirikan untuk melakukan tata kelola usaha, pengembangan investasi, pengoptimalan pemanfaatan aset, peningkatan produktivitas, termasuk di dalamnya adalah membuat jasa pelayanan serta bentuk usaha lainnya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Bumdesa sendiri berbentuk badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa (Permendesa PDTT No 3 Tahun 2021). Karenanya BumDesa akan berfokus pada peningkatan perekonomian Desa dengan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengoptimalkan pemanfaatan aset desa; termasuk juga melakukan berbagai perencanaan kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak lain yang dibutuhkan; serta menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Selain itu BumDesa juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pemerintah pusat membuat program BumDesa yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa yang mana dijalankan dengan berdasar pada falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. BumDesa tiap desa atau beberapa desa bisa mengoperasikan bidang usaha yang didasarkan pada potensi dan informasi pasar masing-masing. Dan pemerintah baik provinsi, kabupaten maupun desa memberikan fasilitas dengan membuat kebijakan agar nantinya memperoleh keuntungan untuk kesejahteraan penyetara modal dan masyarakat (Amri, 2015).

Pemerintah pusat sendiri memberikan dukungan yang sangat besar dalam pembentukan Bumdesa di seluruh Indonesia, seperti tampak dalam prioritas penggunaan dana desa di desa-desa seluruh Indonesia yang diarahkan untuk pembentukan BumDesa sesuai dengan arahan pemerintah. Hal ini karena pemerintah ingin agar nantinya BumDesa bisa menjadi pusat berbagai usaha dalam peningkatan pendapatan masyarakat baik yang berkembang sesuai kekhasan, adat dan budaya masing-masing, maupun kegiatan perekonomian

berupa program dan/atau proyek Pemerintah yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Sebagai bentuk tanggapan atas tantangan program pemerintah pusat, Desa atau Gampong Bakau Hulu yang berada di wilayah Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan juga telah mendirikan BUMDesa. Mengingat istilah Desa di Aceh disebut dengan nama Gampong, maka BUMDesa di Bakau Hulu disebut Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Usaha yang telah dijalankan oleh BUMG saat ini adalah usaha simpan pinjam dengan prinsip Syariah, usaha lain yang telah berjalan adalah jasa persewaan pakaian adat untuk upacara resepsi adat pernikahan. Kedepan, BUMG ini berencana akan membuka usaha dalam industri wisata religi.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada BUMG Bakau Hulu ini adalah meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan kinerja BUMG. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode pendampingan masyarakat secara langsung yang akan didahului dengan melakukan kegiatan *focus group discussion* (FGD). Pendampingan merupakan salah satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2005). Tugas dan fungsi pengabdian dalam kegiatan pendampingan ini adalah sebagai fasilitator, dimana pengabdian sebagai bagian penggerak, katalisator, dan motivator bagi pengelola BUMG, sedangkan pengelola BUMG sebagai pelaku dan pengelola kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencoba menduplikasi kegiatan dari (Wirawan & Raharjo, 2019) dan (Hamzah et al., 2019) yang sama-sama meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa dalam rangka peningkatan kinerja BUMDesa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

1. *Focus Group Discussion* (FGD),

Focus Group Discussion dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul saat pengoperasian BUMG selama ini untuk kemudian bisa didapatkan berbagai perencanaan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut sekaligus merencanakan pengembangan bisnis baru BUMG

2. Pendampingan

Pendampingan di Gampong Bakau Hulu ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Pendampingan langsung merupakan pendampingan kepada para pengelola BUMG secara *face to face* di

lapangan. Sedang pendampingan tidak langsung dilakukan menggunakan alat komunikasi dalam jaringan (daring) untuk melakukan monitoring. Pendampingan langsung di Gampong Bakau Hulu dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2019 dan tanggal tanggal 18 sampai dengan. 22 November 2019. Untuk pendampingan tidak langsung dilaksanakan pada rentang bulan September hingga pertengahan November 2019.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan beberapa capaian yang meningkatkan kapasitas pengelola BUMG Bakau Hulu dalam meningkatkan kinerjanya. Gambaran proses kegiatan ini dapat dilihat dari setiap tahap pelaksanaan yang sebelumnya sudah direncanakan.

Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan melibatkan Kepala Gampong atau Keuchik dan Direktur BUMG Bakau Hulu. Informasi awal yang cukup positif mengenai BUMG Bakau Hulu ini adalah bahwa BUMG Bakau Hulu telah memiliki kantor yang sangat strategis (Gambar 1). Letak kantor yang didirikan di atas tanah kas desa ini berada di dekat pemukiman warga dan tepat di kawasan ekonomi Gampong tersebut. Hal ini tentu menjadi nilai lebih dalam mendukung operasional BUMG.

Perihal administrasi, BUMG ini telah menyusun berkas-berkas administrasinya dengan rapi. Namun setelah kami melihat kembali, ternyata Peraturan Desa/Qonun pendirian BUMG Bakau Hulu substansinya masih seperti Qonun Desa. Dapat dikatakan Qonun tersebut belum spesifik untuk Qonun BUMG, sehingga perlu diperbaiki kembali.

Sebagai luaran kegiatan FGD ini didapatkan hasil identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMG dibagi dengan dasar jenis usaha yang telah dilaksanakan maupun usaha yang sedang direncanakan.

a. Usaha Simpan Pinjam Syariah

Usaha simpan pinjam yang telah dilaksanakan oleh BUMG Bakau Hulu ini menggunakan prinsip Syariah atau pinjaman tanpa adanya tambahan bunga dalam pengembaliannya. Sehingga belum ada keuntungan finansial yang didapatkan karena lebih berorientasi pada sosial. Pada proses bisnisnya, unit usaha ini masih melibatkan Kepala Desa/Keuchik dalam membuat rekomendasi untuk calon debitur BUMG sebagai analisis kelayakan debitur, sehingga dapat dikatakan pengelola BUMG

belum mandiri dalam menjalankan usahanya. Dari segi laporan keuangan unit usaha ini masih menggunakan laporan keuangan sederhana dengan pencatatan menggunakan buku catatan secara tertulis. Padahal BUMDesa ini pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDesa dengan pendekatan aplikasi komputerisasi.

b. Jasa Penyewaan Properti Upacara Adat

Selain usaha simpan pinjam Syariah, usaha lain yang telah berjalan adalah usaha jasa persewaan pakaian adat dan properti lain untuk upacara resepsi adat pernikahan. Unit usaha ini masih tergolong baru, namun usaha ini sudah berjalan dengan baik karena sudah banyak kegiatan resepsi pernikahan yang telah menggunakan jasanya. Dari sisi pelaporan masih menggunakan pelaporan manual dalam bentuk tulisan di sebuah buku.

c. Wisata Religi

Unit usaha wisata religi ini merupakan usaha yang sedang digarap oleh BUMG Bakau Hulu. Unit usaha ini didirikan mengingat Gampong Bakau Hulu ini memiliki potensi wisata yang belum dikemas dengan baik sebagai destinasi wisata unggulan. Bentuk wisata religi berupa konsep wisata ziarah makam Syekh Pancuran, seorang ulama yang berasal dari Sumatera Barat, dimana karyanya menjadi rujukan di Pondok Kajian Tauhid Tasawuf di Meukek-Kabupaten Aceh Selatan. Potensi wisata inilah yang akan dikembangkan sebagai unit usaha BUMG dengan unit usaha wisata religi.



Gambar 1. Kegiatan Focus Group Discussion

Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa perkembangan BUMG cukup positif jika dilihat dari unit usaha yang telah berjalan dan unit bisnis baru yang bermunculan, seperti bisnis wisata religi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan bisnis perikanan, dan pertanian. Namun dari hasil wawancara dan observasi, unit-unit bisnis yang telah didirikan ini belum menggunakan analisis kelayakan bisnis. Dengan banyaknya usaha yang dijalankan dan yang direncanakan, dapat dikatakan bahwa manajemen BUMG ini belum dapat menyusun peta prioritas usaha apa yang akan dijalankan dan memaksimalkan kinerjanya terlebih dahulu. Sehingga usaha yang masih belum ada studi kelayakan ditambah kurang fokusnya manajemen terhadap prioritas usaha yang diunggulkan ini sangat rentan terhadap risiko bisnis di kemudian hari. Dari sisi pertanggungjawaban keuangan bisnis yang telah berjalan, BUMG ini belum mampu memberikan laporan secara komprehensif. Pengetahuan dan keterampilan hasil Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pengelola BUMG ternyata belum mampu diaplikasikan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi latar belakang Pendidikan maupun dari sisi kesibukan pengelola yang masih berfokus pada pekerjaan harian mereka.

Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahap, tahap pertama dilaksanakan melalui pendampingan langsung, tahap kedua dilakukan dengan pendampingan tidak langsung, dan tahap ketiga kembali dilaksanakan melalui pendampingan langsung.

a. Pendampingan Tahap I

Pendampingan dilakukan dengan mendampingi secara langsung para pengelola BUMG secara langsung di kantor BUMG. Pendampingan langsung di Gampong Bakau Hulu tahap pertama ini dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2019. Potensi yang ditemui dalam pengelolaan BUMG ini adalah Pertama, kapasitas pengelola BUMG ini merupakan lulusan sarjana, meskipun rata-rata bukan merupakan sarjana ekonomi, namun lebih kepada sarjana Pendidikan. Sehingga masih dapat dengan mudah diajak bekerjasama dalam peningkatan kinerja BUMG. Kedua, adanya semangat gotong-royong sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung segala program pemberdayaan masyarakat termasuk pengembangan BUMG. Hal ini terlihat dari rendahnya kasus kredit macet dalam usaha simpan pinjam. Disamping itu, mengingat beberapa kendala yang telah diidentifikasi dalam kegiatan FGD, maka dalam pelaksanaan pendampingan tahap pertama ini ambil

kegiatan perbaikan atas kendala sebagai berikut.

1) Perbaikan pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Syariah dan Jasa Penyewaan Properti Upacara Adat

Melihat niat awal usaha simpan pinjam Syariah yang telah dilaksanakan oleh BUMG Bakau Hulu ini lebih berorientasi pada manfaat sosial ekonomi dibandingkan keuntungan secara finansial, maka fokus usaha ini akan tetap berorientasi pada manfaat sosial. Namun agar tidak terjadi permasalahan pada pencatatan transaksi keuangan, maka tim pengabdian menyarankan pencatatan transaksi dilakukan secara manual dan komputerisasi meskipun hanya menggunakan aplikasi excel office yang sederhana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk konsolidasi catatan transaksi keuangan. (Gambar 2).



Gambar 2. Pengecekan Laporan Keuangan Dan Inventarisasi Aset Usaha



Gambar 3. Bukti Fisik Kepemilikan Aset Berupa Pakaian Adat Sebagai Salah Satu Usaha BUMG

Pencatatan transaksi keuangan dengan media komputerisasi ini pula direkomendasikan untuk usaha jasa penyewaan properti

upacara adat, termasuk di dalamnya pencatatan inventarisasi aset properti upacara adat yang telah dimiliki. Pencatatan transaksi keuangan secara komputerisasi ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan BUMDesa untuk mengetahui kondisi keuangan dan memproyeksikan keuntungan di masa depan dengan berbagai asumsi, sehingga dapat menentukan titik impas yang berujung pada target kinerja dalam bisnis tersebut. Pencatatan inventarisasi aset ini dilakukan untuk menginventarisasikan jumlah aset dan melihat kondisi aset yang ada. Sehingga dapat dengan mudah memitigasi risiko kehilangan aset dan dengan mudah diidentifikasi kondisi aset yang baik, kurang baik, hingga rusak.

2) Perbaikan pengelolaan Wisata Religi

Bentuk wisata religi yang akan dikembangkan oleh BUMG Bakau Hulu ini mempunyai konsep wisata ziarah makam Syekh Pancuran yang dikombinasikan dengan konsep kolam renang bagi anak-anak yang diharapkan menjadi daya Tarik tersendiri. Pangsa pasar yang ditetapkan sebagai target pengunjung adalah warga masyarakat di wilayah Aceh Selatan hingga Kota Sulussalam.

Perbaikan pengelolaan unit usaha wisata religi dilakukan dengan membuat analisis lima kekuatan Porter dan analisis SWOT. Analisis lima kekuatan porter dilakukan sebagai analisis peluang bisnis ini di industri wisata di Aceh Selatan, sedangkan analisis SWOT sebagai analisis strategi yang akan dilakukan oleh pengelola BUMG ini untuk meningkatkan kinerja unit usaha wisata ini.



Gambar 4. Ilustrasi konsep Analisis Kekuatan Porter

Gambaran singkat analisis lima kekuatan porter untuk usaha wisata religi (Gambar 4) adalah sebagai berikut:

1) Rivalry (persaingan)

Usaha wisata religi yang sedang dikembangkan oleh BUMG Bakau Hulu ini didapatkan fakta bahwa usaha ini sangat minim pesaing di wilayah Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Hal ini dikarenakan tidak

banyak makan tempat ziarah sebagai destinasi wisata yang dipadu padankan dengan kolam renang anak. Meskipun sebenarnya terdapat pesaing dalam bisnis ini, yaitu "makam tapak tuan" yang ada di kota Sulussalam, namun hal tersebut bukanlah menjadi ancaman mengingat jarak kota subulussalam masih terlampau jauh dengan Gampong Bakau Hulu ini. Mengingat hanya Gampong Bakau Hulu saja yang mempunyai mata air alami dari pegunungan.

2) Barriers to entry (hambatan masuk)

Hambatan masuk dalam segmentasi wisata religi ini cukup berat, mengingat perlu adanya adanya tempat ziarah dan potensi mata air alami yang tidak dimiliki oleh Gampong lain.

3) Supplier Power (kekuatan penawaran)

Kekuatan penawaran unit usaha ini cukup besar disisi sumber daya alam yang sangat mendukung. Dengan catatan harus mempertahankan kelestarian hutan disekitar mata air agar selalu memberikan air alam yang berlimpah untuk Gampong Bakau Hulu.

4) Buyer Power (kekuatan permintaan)

Permintaan akan objek wisata ini cukup besar dengan target market anak-anak usia Sekolah Dasar yang sering melaksanakan damawisata pada hari-hari besar keagamaan Islam.

5) Threat of Substitutes (ancaman substitusi)

Ancaman dari substitusi cukup kecil, mengingat substitusi objek wisata ini adalah objek wisata dengan menyuguhkan keindahan pantai.

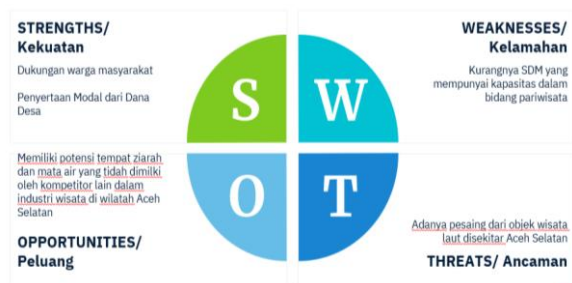
Dari analisis kekuatan Porter ini dapat disimpulkan bahwa, usaha wisata religi yang akan digarap oleh BUMG Bakau Hulu ini masih mempunyai kesempatan untuk berkembang yang cukup besar (Gambar 5).



Gambar 5. Lokasi Pemakaman Tengku Pancuran

Setelah melakukan analisis lima kekuatan Porter, maka selanjutnya adalah melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sekiranya akan dihadapi oleh pengelola unit usaha wisata religi ini. Melalui analisis SWOT ini,

maka strategi yang seharusnya dilakukan oleh BUMG Bakau Hulu ini adalah mengurangi kelemahan dan menangkap peluang usaha yang ada. Mengurangi kelemahan SDM yang masih kurang kompeten dapat dilaksanakan dengan mencari pengetahuan tentang pengelolaan wisata melalui website atau video pembelajaran yang ada di Youtube. Sebagai bentuk menangkap peluang ini, maka BUMG sebisa mungkin segera membangun infrastruktur yang mendukung wisata ziarah dan wisata air ini melalui anggaran Dana Desa. Secara jelas analisis SWOT (Gambar 6).



Gambar 6. Analisis SWOT

b. Pendampingan Tahap II

Pendampingan tahap II dilakukan secara tidak langsung melalui alat komunikasi dalam jaringan (daring) dengan metode monitoring. Pendampingan tidak langsung ini dilaksanakan pada rentang bulan September hingga pertengahan November 2019 melalui sebuah grup pada aplikasi media sosial WhatsApp yang diikuti oleh tim pengabdian, Keuchik (Kepala Desa) dan para pengelola BUMG (Gambar 7)..



Gambar 7. WhatsApp Group Pengabdian Kepada Masyarakat

c. Pendampingan Tahap III

Pendampingan Tahap III ini dilakukan secara langsung di Gampong Bakau Hulu pada tanggal 18 sampai dengan. 22 November 2019. Tujuan pendampingan tahap III ini adalah untuk mengevaluasi capaian perkembangan BUMG secara keseluruhan. Penyelesaian masalah BUMG Bakau Hulu yang berkenaan dengan administrasi

dan keuangan ternyata sampai dengan pendampingan tahap ke III ini belum dapat dilihat dengan baik. Hal ini disebabkan, sekretaris yang memegang administrasi dan keuangan BUMG ini sedang melaksanakan pernikahan, sehingga belum bisa fokus pada tugas-tugas yang bersangkutan sebagai pengelola BUMG. Namun, ada perkembangan yang sangat signifikan berkenaan dengan pengembangan usaha wisata religi. Keseriusan menggarap usaha wisata ini terlihat dari pembangunan lokasi wisata yang sudah mencapai 80% (Gambar 8). Pada libur akhir tahun 2019, tempat wisata ini sudah bisa dibuka untuk umum dan mampu mendatangkan keuntungan untuk BUMG.



Gambar 8. Capaian Pembangunan Kolam Pemandian Anak Sebagai Objek Wisata Pendukung Wisata Ziarah

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan BUMG dan mencoba memberikan masukan yang sekiranya dapat dilaksanakan oleh mitra. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Gampong Bakau Hulu adalah dari segi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, mengakibatkan belum rapinya berkas kelembagaan, perencanaan usaha yang belum menggunakan analisis kelayakan sehingga sangat berisiko. dalam pelaksanaannya, serta pengelolaan keuangan yang masih manual. Guna memperbaiki administrasi pendirian BUMG, maka perlu adanya perbaikan Perdes/Qonun pendirian BUMG.

Dalam mengembangkan unit usaha baru perlu adanya studi kelayakan bisnis agar usaha BUMG ini

dapat dikelola dengan baik dan mampu memitigasi risiko yang akan timbul. Sebagai alternatif bentuk studi kelayakan usaha untuk usaha wisata religi yang akan digarap oleh BUMG ini adalah menggunakan pendekatan analisis lima kekuatan Porter dan Analisis SWOT. Dalam analisis lima kekuatan Porter dapat disimpulkan bahwa BUMG ini layak untuk masuk dalam industri pariwisata dan dianggap mampu bersaing dengan objek wisata lain di sekitar wilayah kabupaten Aceh Selatan.

Melalui analisis SWOT, maka BUMG Bakau Hulu telah mampu mengurangi kelemahan dan menangkap peluang usaha yang ada. Mengurangi kelemahan SDM yang masih kurang kompeten dapat dilaksanakan dengan mencari pengetahuan tentang pengelolaan wisata melalui website atau video pembelajaran yang ada di Youtube. Namun pendampingan pengelolaan SDM ini belum kami laksanakan dengan baik. Sebagai bentuk menangkap peluang ini, maka BUMG dilakukan dengan membangun infrastruktur yang mendukung wisata ziarah dan wisata air ini melalui anggaran Dana Desa. Sebagai penutup kesimpulan, untuk membentuk pertanggungjawaban yang akuntabel maka BUMG perlu menyusun laporan keuangan secara baik sesuai kompetensi yang dimiliki para pengelola BUMG.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan yang telah memberikan fasilitas pendanaan dalam kegiatan ini. Terima Kasih kepada Politeknik Keuangan Negara STAN, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, serta Pemerintah Desa Bakau Hulu yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hingga mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi BUMG Bakau Hulu.

PUSTAKA

- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 3(5). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11820/11056>
- Amri, K. (2015). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Administrasi Negara*, 13 No. 3, 295–299. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/viewFile/3539/3446>
- Hamzah, A. P., Priharjanto, A., & Purwanti, D. (2019). Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Dalam Pelaporan Keuangan Pada BUMDES Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Klaten. 1–10. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/KUAT/article/view/634>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan

- Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wirawan, A., & Raharjo, T. (2019). Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui BUMK Tanjung Anom. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 167–174. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.2304>